

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Widjajanto, Farah Monika, Harini Dyah Kusumastuti, Yulida Pangastuti. *Transionalisasi masyarakat sipil*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Andre A. Ujan dkk, *Moralitas: Lentera Peradaban Dunia*, Yogyakarta: Kanisius, 2011
- Arifin, Firmansyah Dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN Bekerjasama Dengan MKRI Didukung Oleh Asia Foundation Dan Usaid, 2010
- Asvi Warman Adam, *Habibie, Prabowo dan Wiranto Bersaksi*, Jakarta: Media Kita, 2006
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006
- Azumardy Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia, 2008
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Bob Sugeng Hadiwinata. *Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Darji Darmodihardjo, *Suatu tinjauan Filosofis, Historis, Yudiris konstitusional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- David Bentham, *Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Didik Supriyanto et al, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem, 2012
- Eef Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

- F. Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 1987
- George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi. AS Penghambat Demokrasi*. Yogyakarta : Biagraf publishing. . 2000.
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010
- Idris Israil, *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, Malang: Fakultas Peteranakan Universitas Brawijaya, 2007.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: (Praktek ketatanganan Indonesia setelah perubahan UUD 1945)*, Jakarta; Konstitusi Press, 2011
- _____, *Demokrasi dan pemilu di Idonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan etik dan etika konstitusi: (Perspektif baru tentang, rule of law and rule of ethics, constitutional law and constitutional ethics)*, (Jakarta,; Sinar Grafika, 2014)
- _____, *Perkembangan & Konslidasi Lembaga Negara Pasca Amademen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- _____, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, 2008
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- _____, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy*, Cetakan ke I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Kuntowijoyo, *Budaya & Budaya Birokrasi*, Yoyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1994

- Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: P.T. Eresco, 1978
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative of Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Edisi Revisi, 2000
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- M. Tolchah Mansoer, *Pembahasan beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2008
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
- Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan, 2008
- Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Prihatmoko, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Riri Nazriyah, *MPR RI, Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

- Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 1997
- Saldi Isra; *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2009
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta: Gatra Pustaka, 2010
- Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Syahran Basah , 1992, *Ilmu Negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, Bandung: PT. Citra Adya Bhakti, 1992
- Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1993
- Suparman Marzuki *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014
- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan, 2009
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wirana I Gede, *Dasar-Dasar Etika an Morlitas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Zaki Mubaroq, *Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lampung: Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2013.

JURNAL:

- Brian Tamanah, lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, “*The Concept of Rule of Law*”, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004

- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2009.
- Dartina Farida Sinaga, “Pemilu Umum di Indonesia, Pemilihan Caleg dan Pilpres/Cawapres”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, vol. 14, nomor 4 Desember 2009
- Johan Erwin Isharyanto, *Pemilihan Umum Dalam Sistem Perspektif Budaya Hukum Berkonstitusi*, (Yogyakarta: Jurnal Konstitusi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol II Nomor 1, Juni 2010
- Joko Riskiyono, *Hak Publik Berpartisipasi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Demokrasi*, Perludem, Jurnal Pemilu dan Demokrasi Memotret Penegakan Hukum Pemilu 2014 No. 6 Tahun 2013
- J. Sudarminta, *Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban* Jurnal Basis Vol. 40, No. 5, 2003
- Muh. Salman Darwis, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.
- Tim Eska Media. *Edisi Lengkap UUD 1945*. Jakarta: Eska Media. 2002.

Wabsite:

- <http://docplayer.info/302269-badan-pengawas-pemilihan-umum.html>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum, Diakses pada tanggal 23 Juli 2016.
- <http://news.detik.com/berita/260633/ini-jumlah-perkara-yang-ditangani-dkpp-terkait-pemilu-selama-2-tahun>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2016 Pada Tanggal 23 Juli 2016
- <http://www.gatra.com/politik/pemilu/dkpp/205505-selama-juni-2015-hingga-juni-2016-dkpp-terima-585-pengaduan-perkara>, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2016
- <http://www.dkpp.go.id//index.php?a=detilberita&id>, Dkpp DKPP terima 493 Pengaduan Pilkada Serentak, Akses 23 Juli 2016.
- <http://viva.news.co.id/news/red/724214>, Wawacacara; hukum bukan segala galanya, Akses 23 Juli 2016

<http://www.beritasatu.com/hukum/90717-keputusan-dkpp-dinilai-lampau-kewenangan.html>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016.

<http://www.siswamaster.com/2015/11/pengertian-dan-macam-demokrasi.html/16> September 2016

<http://kayanmanggala.blogspot.co.id/2013/05/demokrasi-langsung-dan-keterwakilan.html>, Diakses Pada Tanggal 16 September 2016

<http://www.hanscream.co.vu/2014/04/makalah-demokrasi-dan-partisipasi,20> September 2016

<http://makalahpaimin.blogspot.com/2009/04/Hukum-Administrasi-Negara.htm>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2016

<http://law-and-ethics.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-hukum-menurut-para-sarjana.html>, Diakses Pada Tanggal 25 September 2016

Jimly Assihiddiqie, Pemikiran Lembaga negara, <http://www.jimly.com/>, Diakses Pada Tanggal 30 September 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke, Diakses Pada Tanggal 30 September 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia, Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_15_Penyelenggaraan_Pemilu, pdf, Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2016

<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2016

<http://berbagi-segala.blogspot.co.id/2013/01/sistem-pemerintahan-negara-menurut-uu.html>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2016

https://www.academia.edu/8838989/Indonesia_Sebagai_Negara_Hukum_Indonesia_Sebagai_Negara_Hukum, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2016

<https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2016

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2016

<http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html>/Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2016

<http://www.mag.co.id/tugas-dan-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan-atau-bpk/>,Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2016

http://www.kompasiana.com/syamjr/penyempurnaan-pasal-pasal-uud-1945-untuk-mengatasi-konflik-presidential-threshold_html,Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2016

<http://kartojenious.blogspot.co.id/2013/12/lembaga-negara-bantu.html>,Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2016

http://www.kompasiana.com/jusmandalle/mengenal-dkpp-dan-perannya-selama-sengketa-pilpres_/Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2016

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/493947-mk-putusan-dkpp-bisa-digugat-ke-ptun>,Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2016

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_si_dang_1569_115%20PHPU%_.pdf,Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2016

<http://reformasihukum.org/ID/file/buku/EBook%20Memperkuat%20Kemandirian%20Penyelenggara%20Pemilu.pdf>,Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533d922ad6dce/mk-buka-peluang-keberatan-terhadap-putusan-dkpp>,Diakses Pada Tanggal 1 November 2016

<http://www.kompasiana.com/arifudin.fh.uia/pergeseran-kewenangan-dkpp-ri-studi-kasus-putusan-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-nomor-74-dkpp-pke-ii-2013-pada-perkara-pelanggaran-kode-etik-oleh-anggota-kpu-provinsi-jawa-timur>,Diakses Pada Tanggal 4 November 2016

<https://www.kaskus.co.id/thread/53f83b38a4cb17517e8b45b7/mengenal-dkpp-dan-perannya-selama-sengketa-pilpres/>,Diakses Pada Tanggal 4 November 2016

http://hrrca.org/wpcontent/uploads/2015/09/Rule_of_law_untuk_Hak_Asasi_Manusi_a.pdf,Diakses Pada Tanggal 6 November 2016

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/236686/pengadilan_pemilu_indonesia_belajar_ke_amerika_latin.html#.VVhb5vAYPuw, diakses pada Tanggal 6 November 2016.

<http://www.law.uui.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-Kedudukan-Lembaga-Lembaga-Bantu-Dalam-Sisitem.pdf>, Diakses Pada Tanggal 8 November 2016.

<http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, Diakses Pada Tanggal 8 november 2016

Peraturan-Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang “Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 2012 tentang pengangkatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

Republik Indonesia, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

Republik Indonesia, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4250).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252).

Undang-Undang NO.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429).

